

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak tahun 1976 dibentuklah *Association Southeast Asia Nation* (ASEAN) adalah organisasi internasional regional kawasan Asia Tenggara. ASEAN sudah banyak mengalami perkembangan dari masa ke masa sesuai dengan harapan dan cita-cita para pendiri organisasi kawasan ini, untuk menjalin persahabatan dan kerjasama dalam menciptakan wilayah yang aman, damai dan makmur. Dalam perkembangan selanjutnya ASEAN bersepakat untuk membentuk suatu kawasan yang terintegrasi dalam satu komunitas negara-negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil dan sejahtera serta saling peduli dan terikat kerjasama.

Komunitas Ekonomi ASEAN, melalui kerjasama ekonomi yang solid dan saling membantu satu sama lainnya akan membentuk stabilitas ekonomi di kawasan dan menjadikan negara-negara anggota ASEAN sebagai salah satu kekuatan besar ekonomi dunia, dan pada tahun 2015 akan menjadikan ASEAN sebagai organisasi internasional kawasan dimana aliran barang, jasa, investasi serta tenaga terampil dan modal lebih bebas bergerak di kalangan kesepuluh negara anggota ASEAN. Interaksi antar negara-negara anggota ASEAN juga menunjukkan kemajuan yang berarti.

Hal ini bisa dilihat diberbagai kerjasama yang semakin luas dan mendalam antara Negara-negara ASEAN maupun dengan Negara-negara Mitra Wicara seperti: Amerika Serikat, Australia, Republik Rakyat Tiongkok, India, Cina, Jepang dan lain-

lain. Namun untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut terdapat permasalahan yang harus dihadapi negara-negara ASEAN diantaranya adalah kemiskinan (Darmayadi, 2015).

Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Definisi mengenai kemiskinan dibentuk berdasarkan identifikasi dan pengukuran terhadap sekelompok masyarakat golongan yang selanjutnya disebut miskin (Nugroho, 1995).

Pada umumnya, setiap negara termasuk Indonesia memiliki sendiri definisi seseorang atau suatu masyarakat dikategorikan miskin. Hal ini dikarenakan kondisi yang disebut miskin bersifat relatif untuk setiap negara misalnya kondisi perekonomian, standar kesejahteraan, dan kondisi sosial. Setiap definisi ditentukan menurut kriteria atau ukuran-ukuran berdasarkan kondisi tertentu, yaitu pendapatan rata-rata, daya beli atau kemampuan konsumsi rata-rata, status kependidikan dan kondisi kesehatan.

Kemiskinan biasanya dijumpai di negara-negara berkembang dan negara-negara dunia ketiga. Persoalan kemiskinan masyarakat di negara-negara ini tidak hanya sekedar bentuk ketidakmampuan pendapatan, akan tetapi sudah meluas pada bentuk ketidakberdayaan secara sosial maupun politik (Suryawati, 2004). Kemiskinan juga dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan pendapatan antar daerah (Harahap, 2006).

Negara-negara anggota ASEAN yang tergolong negara belum maju atau negara miskin diantaranya Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam. Kemiskinan di negara-negara tersebut disebabkan karena tingginya tingkat kesenjangan yang merupakan salah satu masalah yang rumit untuk diselesaikan. Selain itu faktor yang mempengaruhi kemiskinan di negara-negara ASEAN diantaranya korupsi, pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia. Angka korupsi di negara-negara miskin ASEAN masih tergolong sangat besar, sebagai contoh di Myanmar pada tahun 2014 angka korupsi hampir mencapai 50%. Praktek korupsi yang terjadi dianggap sebagai penyebab sulitnya menurunkan angka kemiskinan. Adanya korupsi menyebabkan anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan, menyediakan fasilitas kesehatan, menyediakan infrastruktur dan memperluas lapangan kerja menjadi berpindah ke tangan-tangan yang tidak

bertanggung jawab. Hal ini menyebabkan kondisi penduduk miskin semakin terpuruk (Darmayadi, 2015).

Kemiskinan yang dialami seseorang terlihat dari kurang terpenuhinya kesejahteraan orang tersebut. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) yang dikeluarkan oleh *United Nation Development Programme* (UNDP). IPM mengukur derajat pembangunan manusia yang merupakan salah satu aspek penting dari kualitas pembangunan ekonomi. IPM mendefinisikan kesejahteraan secara lebih luas dari pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB). IPM mengukur tiga dimensi pembangunan manusia, yaitu kesehatan yang diukur dari usia harapan hidup, pendidikan yang diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran sekolah dasar, lanjutan dan tinggi, serta standar hidup layak yang diukur dari paritas daya beli dan penghasilan.

Selama lebih dari empat dekade sejak diresmikan pada deklarasi Bangkok tahun 1967 oleh para pemimpin negara Asia Tenggara, ASEAN sudah menjadi kekuatan regional terbesar di dunia setelah Uni Eropa. Di tengah krisis yang melanda Amerika Serikat dan Uni Eropa, ASEAN dan China seakan menjadi daya tarik dan harapan baru bagi perekonomian global. Tingginya antusias internasional terhadap ASEAN karena negara-negara lain ingin berinvestasi lebih banyak di kawasan ASEAN. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, nilai investasi yang masuk ke

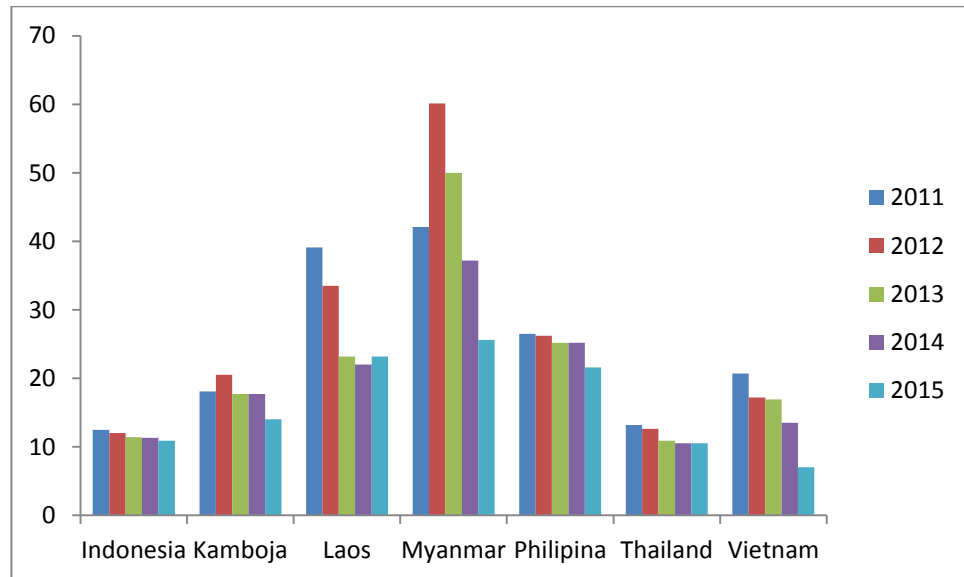
kawasan ASEAN pada tahun 2009 tercatat 37,8 miliar dollar AS dan tahun 2010 kenaikan investasi mencapai 100 persen menjadi 70,8 miliar dollar AS.

United States Agency for International Development (USAID) mengatakan bahwa korupsi merusak pembangunan ekonomi. Pada sektor swasta, korupsi meningkatkan biaya bisnis melalui harga dari suap itu sendiri, biaya manajemen dari negosiasi dengan pejabat dan resiko dari pelanggaran kesepakatan. Meskipun begitu ada beberapa orang mengklaim, bahwa korupsi telah menurunkan biaya dengan adanya pemotongan birokrasi.

Pembangunan manusia tidak hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi, akumulasi kapital, dan proses produksi tetapi juga memperluas pilihan-pilihan penduduk. Pilihan tersebut yang dianggap paling penting adalah dimensi usia dan kesehatan, berpendidikan, dan standar hidup yang layak. Alasan pembangunan manusia sangat penting adalah banyak negara berkembang yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong peningkatan GDP namun gagal dalam mengatasi kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan.

Dari Gambar 1.1, kemiskinan tertinggi dari tahun ke tahun berada di Negara Myanmar, dengan presentase penduduk miskin pada tahun 2011 sebesar 42.1 persen. Sedangkan pada tahun 2012 presentase penduduk miskin masih di tempati oleh Negara Myanmar dengan 60,1 persen, lalu pada 2013, 2014, dan 2015 presentase penduduk miskin masih ditempati oleh Negara Myanmar. Jadi bisa ditarik simpulan

bahwa Negara-negara ASEAN dengan kemiskinan nya tertinggi tiap tahunnya ditempati oleh Negara Myanmar.



Sumber : Word bank, 2011-2015 (%)

Gambar 1.1
Kemiskinan di Negara ASEAN tahun 2011-2015

Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti tentang variabel kemiskinan, seperti yang telah dilakukan oleh Waruyu (2016), dengan judul Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Belanja Pemerintah, dan Investasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Hasil nya menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan seignifikan terhadap kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliati (2016) yang berjudul Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Upah terhadap Kemiskinan di Provinsi DIY. Hasilnya menyimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di DIY yang berarti apabila IPM naik maka akan menurunkan kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan Gadis (2013) yang berjudul Hubungan Korupsi dan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Indonesia dengan hasil bahwa korupsi dalam bentuk persepsi korupsi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan yang berarti korupsi belum mempengaruhi kemiskinan secara makro artinya korupsi bukan merupakan faktor utama yang menyebabkan kemiskinan di Kabupaten/Kota di Indonesia.

Dari yang telah di uraikan di atas penulis tertarik untuk mengambil judul tentang **“Analisis Pengaruh Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Negara-Negara ASEAN tahun 2011-2015”**.

B. Batasan Masalah

Mengingat ruang lingkup Kemiskinan sangat luas maka penulis membatasi pembahasan masalah dengan melihat seberapa besar pengaruh Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pembangunan Manusia, Terhadap Kemiskinan di Negara-negara ASEAN tahun 2011-2015.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar pengaruh korupsi terhadap kemiskinan Negara-negara ASEAN tahun 2011-2015.
2. Seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Negara-negara ASEAN tahun 2011-2015.
3. Seberapa besar pengaruh pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Negara-negara ASEAN tahun 2011-2015.

D. Tujuan

Berdasarkan rumusan permasalahan, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh korupsi terhadap kemiskinan di Negara-negara ASEAN tahun 2011-2015.
2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Negara-negara ASEAN tahun 2011-2015.
3. Untuk menganalisis pengaruh pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Negara-negara ASEAN tahun 2011-2015.

E. Manfaat

Dalam penelitian yang akan dilakukan, kiranya dapat memberikan kegunaan sebagai berikut

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan pemahaman lebih lanjut dalam rangka memperluas wawasan dan wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dalam bidang ekonomi.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang dapat mempraktikkan teori dengan realita yang ada.

b. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi, acuan bagi penulis lainnya yang tertarik dengan penelitian yang berkaitan dengan ekonomi.

c. Bagi pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah dapat berperan serta memperhatikan pengaruh korupsi, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Negara ASEAN.